

LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita

Berita 1

Judul :Jaleswari Pramodhawardani Menduga RUU TNI Dilakukan untuk Tenangkan TNI dari Polri

Jurnalis: Andi Adam dan Hanin Marwah

Media : Tempo.co

The image shows a screenshot of a news article from the website Tempo.co. The article is titled "Jaleswari Pramodhawardani Menduga RUU TNI Dilakukan untuk Tenangkan TNI dari Polri". The author is listed as Andi Adam and Hanin Marwah. The article is dated 22 Maret 2025. The main text discusses Jaleswari Pramodhawardani's speculation that the proposed TNI Bill (RUU TNI) is aimed at calming the TNI from the influence of the Polri. It mentions that Jaleswari, a former TNI officer, believes the bill is a response to the TNI's growing influence and the potential for a military coup. The article also notes that the bill is expected to be passed by the DPR in the coming days. The screenshot includes a video player showing Jaleswari speaking, and various social media sharing options.

Jaleswari Pramodhawardani Menduga RUU TNI Dilakukan untuk Tenangkan TNI dari Polri

Kepala Lab 45, Jaleswari Pramodhawardani, menduga RUU TNI bisa berdampak pada dominasi militer di era pemerintahan lima tahun ke depan.

22 Maret 2025 | 07:11 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Jaleswari Pramodhawardani merasa janggal dengan rancangan perubahan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 soal TNI yang fokus pada masalah usia pensiun prajurit. Kepala Lab 45 ini menilai tiga pasal yang disasar **revisi UU TNI** tidak menasar kepada perubahan yang sifatnya paradigmatik, tapi pragmatis.

Jaleswari / Yansen/Wardana - TEMPO/Utami/Anisa

Meskipun ditentang oleh koalisi sipil, DPR akan mengesahkan revisi UU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025. Anggota koalisi masyarakat sipil Ardi Manto Aniputra mengatakan hasil revisi Undang-Undang TNI menunjukkan jika DPR dan pemerintah cenderung memberikan fleksibilitas pada militer.

"Ini adalah perubahan paradigma yang berupaya mereduksi supremasi sipil," kata Ardi dalam telekonferensi, Rabu, 19 Maret 2025. Perubahan paradigma yang dimaksud Ardi terjadi pada perubahan besar-besaran sejumlah pasal dalam UU TNI. Misalnya, Pasal 47 yang mengatur jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI. Pasal 47 ayat (2) UU TNI sebelum revisi memberi pengecualian terhadap 10 lembaga sipil yang dapat diduduki oleh prajurit.

Namun, DPR dan pemerintah memrevisi ketentuan tersebut. Aturan awal dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi: lalu jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit dijadikan ayat (1). DPR dan pemerintah juga memperluas lembaga sipil bagi prajurit TNI, dari 10 menjadi 14 kementerian/lembaga.

Daftar kementerian atau lembaga tersebut antara lain kementerian yang membidangi koordinator bidang profilik dan keamanan negara, pertahanan negara, sarnamuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, dan intaljen negeri.

Kemudian, siber dan atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkoba nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Ardi khawatir perluasan jabatan sipil tersebut akan mengembalikan peran militer semakin meluas dan mereduksi supresiasi sipil dan demokrasi. "Ini yang kami katakan sebagai kembalinya dwifungsi militer," kata Direktur Imparsial ini.

DPR Jamin Dwifungsi TNI Tidak Bangkit lagi

Ketua DPR Puan Maharani menjamin sistem dwifungsi di TNI tidak akan bangkit melalui RUU tersebut. Puan menegaskan Revisi UU TNI mengatur prajurit aktif harus mengundurkan diri apabila menjabat di luar kementerian atau lembaga yang ditetapkan.

"Kalau kemudian bukan dalam jabatan-jabatan tersebut, TNI aktif harus mundur. Dalam revisi UU TNI itu sudah jelas dan clear," kata Puan di Gedung DPR, Senayan pada Senin, 17 Maret 2025.

Adapun Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyangkal Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan Revisi UU TNI. Supratman menegaskan bahwa inisiatif perumusan RUU TNI berasal dari DPR RI sejak periode sebelumnya.

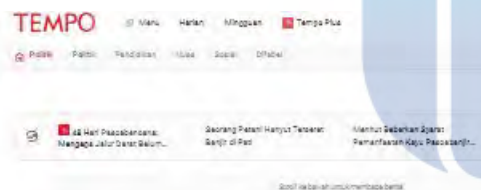
"Ini kan bukan soal Pak Prabowo atau Presiden yang minta. Ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu. Bukan inisiatif pemerintah," kata dia saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Maret 2025.

Berita 2

Judul : Aksi Tolak Revisi UU TNI: Sopir Ojol Diduga Dikeroyok Polisi, Yogyakarta Bertahan hingga Dini Hari

Jurnalis: Daniel Ahmad Fajri

Media : Tempo.co



Aksi Tolak Revisi UU TNI: Sopir Ojol Diduga Dikeroyok Polisi, Yogyakarta Bertahan hingga Dini Hari

Kritik atas RUU TNI yang diresmikan menjadi undang-undang masih berlangsung setelah pengesahan. Bagaimana aksi di berbagai daerah kemarin?

25 Maret 2025 | 07:45 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Kritik atas RUU TNI yang diresmikan menjadi undang-undang masih berlangsung setelah pengesahan pada Kamis, 20 Maret 2025. Sejumlah elemen masyarakat di beberapa daerah di Indonesia seperti Surabaya dan Pekanbaru turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Mereka menolak revisi UU TNI.

Jakarta
Persepsi gelut dari aparat kepolisian memukul insentif para demonstran aksi tolak revisi UU TNI di Senayan depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada sekitar pukul 19.50 WIB. Suasana jalan mulai berisik dari massa dua jari kemudian.

BACA JUGA
- Aksi M. Hidayat di Senayan 17 Maret 2025
- Demonstrasi RPTM, Menteri Dalam Negeri Tegaskan Polisi Tidak Harus

Hari pertama Tempo di lapangan, polisi menggunakan senapan air atau water cannon untuk membarikadehas. Setiap rentang jarak sekitar 50 meter sekali, water cannon tersebut ditumbukkan ke arah massa aksi.

Sebelumnya polisi menggunakan pengemudi ojek online berbagai brand saat terjadi aksi menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Peristiwa itu terjadi di kelong jembatan layang JOC, tidak jauh dari lokasi aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Aksi itu terlihat dipukul dengan pentungan dan ditentang oleh beberapa polisi. Ada sedikit belasan polisi yang mengerubunginya.

Yogyakarta
Pasukan anti huru-hara Polri mendesak keluar massa aksi tolak revisi UU TNI keluar dari kompleks DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Malliboro, Kota Yogyakarta pada Jumat dini hari.

Serdantrian keamanan Tempo, sekitar pukul 06.40 WIB, kepolisian mengerahkan tiga unit kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) dan puluhan polisi anti huru-hara untuk mendesak massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan aktivis dari gerakan Aliansi Jogja Menentang RUU TNI keluar dari kantor DPRD.

Keseluruhan senapan terpadu ketika massa aksi menolak revisi aksi saling dorong antara massa dan polisi. Semburan air water cannon kemudian taktis polisi membarikadehas aksi terdorong keluar kompleks DPRD DIY.

Semarang
Aksi tolak revisi UU TNI di Semarang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Jalan Paksiwani yang ada di depannya. Mereka juga berusaha masuk ke kantor DPRD. Massa sempat memukul bilah-bilah lantai di dalam ke luar oleh aparat. Sejumlah mobil polisi air ditugaskan.

Sekelompok lima orang ditangkap dalam proses ini. Pengunjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (Inyordis) di penerojo, Aulis Ikhla Ajiy mengatakan lima orang itu di antaranya tiga dari mahasiswa dan dua dari elemen masyarakat lain.

Seorang mahasiswa mengaku menjadi korban pemukulan oleh aparat keamanan. Awalnya mahasiswa berinisiatif L itu mengukir monumen politik untuk tidak memukul peserta aksi. L dipukul hingga membuatnya tersungkur. Ia lantas ditangkap dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan dibebaskan pukul 21.00 WIB setelah ada pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan dosen Soegijoprana Catholic University.

Pekabaru

Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Riau berdemostrasi menolak revisi UU TNI di depan kantor DPRD, Pekanbaru. Mereka menganggap UU baru TNI dapat merugikan warga sipil.

Aksi berjalan lancar dan tanpa insiden besar. Kukuh El Hakim, mahasiswa Universitas Abdurrahman mengatakan aksi damai seperti ini menunjukkan kedewasaan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengesankan, meski aksi tersebut bermanfaat, bukan berarti mereka akan berhenti berjuang.

Mahasiswa di Riau kini tengah berupaya menggalang dukungan yang lebih luas untuk menolak pengesahan Revisi UU TNI, dengan rencana aksi lanjutan.

Surabaya

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Front Anti Militarisme melakukan demonstrasi menolak UU TNI di depan Gedung Negara Graha di Surabaya, Jawa Timur. Pada saat bersamaan, terdapat kegiatan apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Semeru 2025 di Lapangan Upacara Gedung Negara Graha. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Massa aksi mulanya berada di dekat Patung Gubernur Suryo, Taman Apsari Surabaya. Menjelang pukul 15.00 WIB, mereka mendekati maju ke arah Gedung Graha. Saat itu, polisi sempat mendorong massa untuk mundur. Namun, massa aksi tetap memaksa maju hingga ke tengah Jalan Gubernur Suryo.

Massa aksi mulanya berada di dekat Patung Gubernur Suryo, Taman Apsari Surabaya. Menjelang pukul 15.00 WIB, mereka mendekati maju ke arah Gedung Graha. Saat itu, polisi sempat mendorong massa untuk mundur. Namun, massa aksi tetap memaksa maju hingga ke tengah Jalan Gubernur Suryo.

Berita 3

Judul : Fakta-fakta RUU TNI Disahkan Walau Tuai Penolakan
 Jurnalis: Hendrik Khoirul Muhid

Media : Tempo.co



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolukhuk) Wiranto (kiri) memimpin upacara penandatanganan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan (Perubahan) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (20/3/2024). (Foto: Antara/Agensi Berita)

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Pada pengesahan itu diketuai Ketua DPR RI Puan Maharani seiring persetujuan seluruh fraksi dalam Sidang Paripurna ke-15 pada Kamis, 20 Maret 2024.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang," kata Puan sebelum kemudian disetujui terlanjur persetujuan.

Pembahasan RUU TNI sudah dicarikan dua dibicarakan sejak tahun lalu. Berapa mendei lantaran upaya pada demonstrasi 2024, pembahasannya kembali digalakan seiring Presiden Prabowo.

Suharto mengiri surat kepada DPR, surat yang dilayangkan pada 18 Februari itu berisi permohonan dan peninjauan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI.

Pada tanggal yang sama, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menerima surat pimpinan DPR terkait pengesahan pembahasan RUU TNI. Setelah itu Komisi I DPR kemudian menggelar rapat intern pada 27 Februari 2024, untuk menyoal pembekuan panitia kerja dengan komposisi sebanyak 23 anggota.

"Kompat komisi I DPR RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat RUU TNI dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai bagian meeting of participation," kata Utut dalam sidang paripurna Kamis.

Lelah lanjut, Utut mengatakan Komisi I DPR telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan RUU TNI bersama perwakilan pemerintah, koalisi masyarakat sipil, hingga internal komisi I melalui panitia kerja (panka). Atas laporan Utut, Puan lantas meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir sidang paripurna menyetujui RUU TNI disahkan menjadi UU.

2. Yang berubah dari UU TNI
 Adapun perubahan dalam UU TNI di antaranya ialah melakukan koordinasi TNI, penyalahan bidang operasi militer selain perang (OMSP), penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan peninjauan masa dinas kejuruteraan atau lain-lain pada pemin.

Sebagaimana dituangkan dalam perubahan Pasal 47 UU, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil tersebut, TNI aktif harus menaruh atau penaruh dari dinas kejuruteraan.

Ada dua tugas pokok baru OMSP yang ditambahkan, yaitu meliputi pembinaan dalam menggunakan keamanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

"Halau terjadi akan dilaksanakan hal seperti itu, namun jika tidak

"Jika itu terjadi akan dilaksanakan hal seperti itu, namun jika tidak jangan sampai terjadi, dan itu hanya penambahannya itu adalah untuk alih dan penyelesaian warga negara di luar negeri jika dibutuhkan," ujarnya.

3. TNI boleh berbisnis?

Sebelum disahkan, ramai didendakan ada upaya mendorong agar aturan pelanggaran berbisnis terhadap anggota TNI aktif dihapus lewat RUU TNI. Wacana itu berdesus kerucang pada Juli 2024 dan kembali mendapat keberasan waktu terakhir. Namun, rencana penghap itu tak diorapkan dalam beleid terbaru.

"RUU TNI yang baru disahkan tetap melarang TNI berbisnis dan berpolitik praktis. Pasal 39 dalam UU itu masih memberatkan larangan dalam kedua aspek tersebut. Bahkan kalau di Pasal 47 Cuma ada 14 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki TNI aktif. Di luar itu harus mundur atau pensiun dini," kata Puan.

4. Massa unjuk rasa tolak pengesahan RUU TNI

Sementara itu, sejak Kamis dini hari di luar gedung DPR, kelompok masyarakat sipil telah mendirikan tenda untuk menolak pengesahan RUU TNI. Fenjagaan ketat pun terlibat di sekitar gedung DPR. Bukan hanya Polri, namun terlibat juga aparat dari TNI memasuki gedung Dewan.

Namun pada siang harinya, massa aksi di gedung DPR/MPR terpaksa mundur karena aparat kepolisian mengerahkan meriam air atau water canon. Polisi juga mengerahkan sejumlah anggota untuk membatalkan aksi menolak pengesahan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 atau UU TNI itu.



Penunjuk-rasa

Berdasarkan pantauan Tempo, mahasiswa yang ikut berunjuk rasa harus mundur mengarah ke Senayan Park. Alasan anggota polisi yang berjalan membawa perisai taktis serta tongkat. Ada pula anggota polisi yang menggunakan kendaraan roda dua dengan membawa pelontar gas air mata.

Kepolisian mengupit dua ruas jalan, pertama dari arah Senayan Park, kemudian dari arah jembatan layang Petamburan. Mahasiswa akhirnya terpaksa berbelok ke berbagai arah seperti Senayan Park, jembatan layang menuju Semanggi dan jalan tol S. Parman.

Tempo juga memantau terdapat beberapa mahasiswa yang ditangkap oleh polisi. Anggota yang menggunakan kendaraan roda dua mengeser pengunjuk rasa. Dua sepeda motor milik massa aksi terpaksa dianggalkam oleh mereka agar tidak tersangkut oleh aparat kepolisian.

5. Alasan RUU TNI ditolak pengesahannya

Pengesahan RUU TNI mendapatkan penolakan salah satunya dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Dalam konferensi pers bertajuk "Kejahatan Legislasi dalam Persepsi UU TNI 2025" secara daring pada Kamis, Koordinator KIKA Satria Unggul mendorong masyarakat sipil bersatu mendesak pemerintah membatalkan UU TNI tersebut.

Satria menjelaskan beberapa alasan masyarakat secara umum harus menolak. Pertama, gihaknya menilai hasil revisi akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI. Hal ini dikarenakan UU TNI menarik kembali TNI ke dalam peran sipil politik bahkan ekonomi-bisnis seperti masa Orde Baru.

5. Alasan RUU TNI ditolak pengesahannya

Pengesahan RUU TNI mendapatkan penolakan salah satunya dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Dalam konferensi pers bertajuk "Kejahatan Legislasi dalam Persepsi UU TNI 2025" secara daring pada Kamis, Koordinator KIKA Satria Unggul mendorong masyarakat sipil bersatu mendesak pemerintah membatalkan UU TNI tersebut.

Satria menjelaskan beberapa alasan masyarakat secara umum harus menolak. Pertama, gihaknya menilai hasil revisi akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI. Hal ini dikarenakan UU TNI menarik kembali TNI ke dalam peran sipil politik bahkan ekonomi-bisnis seperti masa Orde Baru.

"Hal itu terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi. Jika hal ini dibiarkan akan berdampak serius pada suramnya masa depan demokrasi, tergangunya negara hukum dan peningkatan eskalasi pelanggaran berat HAM di masa depan," ujarnya.

Alasan kedua, menurut dia UU TNI bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik (CCPR), Universal Periodic Review (UPR), serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Senyiksaan (CAT). Sementara itu, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kerangka Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Anti-Senyiksaan (CAT), yang mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil.

"Hal tersebut tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional," katanya.

Alasan ketiga, Satria menegaskan dampak impunitas yang dimiliki anggota TNI yang akan berpengaruh terhadap tindakan sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Hal ini bisa mengancam kebebasan sipil dan demokrasi dalam menyuarakan pendapat dan kritik serta berpengaruh terhadap kekuatan politik yang ada.

"Di mana aktor-aktor politik yang terlibat dalam pelanggaran HAM masih memiliki posisi kekuasaan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menghasilkan keputusan yang bias serta bertentangan dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law)," tuturnya.

Humaira Izudin, M. Kaihan Muzaki, dan Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini. **Pilihan editor: Aksi Amisan Surabaya Tolak RUU TNI, Dulu Pameran Operasi Ketupat Sempat Tertunda**

Berita 4

Judul : Aktor, Modus, dan Motif Revisi Undang-Undang TNI
Jurnalis: Bagja Hidayat

Media : Tempo.co

TEMPO | News | Home | Minggu | Tempo Plus

Profil | Score Peringkat | Subdomain | Login | Keluar & Akun | Kontak | Statistik | About

Dua Hala Partai Bersatu | **Kel Partai Terdiri 225** | **Anggota DPRD Kota Bogor**

Seputri Berani | **Seputri Berani**

Aktor, Modus, dan Motiv Revisi Undang-Undang TNI

Revisi Undang-Undang TNI sudah bergulir. Prabowo Frabowo sudah mulai. Melakukan perubahan undang-undang adalah pertanggung jawaban.

12 Maret 2025 16:20 WIB



Revisi Undang-Undang TNI sudah bergulir. Prabowo Frabowo sudah mulai. Melakukan perubahan undang-undang adalah pertanggung jawaban.

Ringkasan Berita

Prabowo Subianto sudah mulai menggerakkan Undang-Undang TNI untuk melakukan proses revisi.

DPK menggunakan Undang-Undang TNI untuk melakukan Program Legislatif Nasional (PLN) 2025.

Pemangku berita pada Selasa (12/3) berlatar dari 15 lokasi menjadi 25 sehingga lengkap.

PERTANYAAN terdengar setelah Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah mengapa pemerintah begitu ingin melakukan revisi ini? Anggota DPR mengemukakan kritik dan pembenaran politik yang begitu deras, bahkan setelah sejumlah aktivis menggogokkan rapat terungkap secara di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Laporan utama Tempo pekan ini berfokus mengungkap tiga aspek dalam revisi UU TNI. Setidaknya ada tiga pertanyaan pokok yang menggantung siapa aktor, bagaimana modus, dan apa motif di balik pengesahan UU TNI signifikan ini?

Aktor

Aktor utama tentu saja Presiden **Prabowo Subianto**. Ia menginginkan ada perubahan Undang-Undang TNI jauh sebelum menjadi presiden. Ia mengajuk berdiskusi beberapa kali pertahanan sejak 2023. Karena itu, ia begitu terpuh menjadi presiden pada Februari 2024. Ia menginginkan revisi Undang-Undang TNI disahkan dalam tiga bulan pertamanya berkuasa.

Modus

Sementara menjadi kebingungan terpendam Prabowo, draf RUU TNI tak masuk **Program Legislatif Nasional 2025** yang disahkan DPR akhir tahun lalu. Draft RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU TNI. Bahkan RUU TNI tak masuk daftar dengan rancangan yang diajukan pemerintah. Begitu juga daftar 176 RUU yang akan dibahas DPR hingga 2029.

BACA JUGA

- 01. **01.03.2025** | **01.03.2025** | **01.03.2025**
- 02. **02.03.2025** | **02.03.2025** | **02.03.2025**
- 03. **03.03.2025** | **03.03.2025** | **03.03.2025**
- 04. **04.03.2025** | **04.03.2025** | **04.03.2025**
- 05. **05.03.2025** | **05.03.2025** | **05.03.2025**
- 06. **06.03.2025** | **06.03.2025** | **06.03.2025**
- 07. **07.03.2025** | **07.03.2025** | **07.03.2025**
- 08. **08.03.2025** | **08.03.2025** | **08.03.2025**
- 09. **09.03.2025** | **09.03.2025** | **09.03.2025**
- 10. **10.03.2025** | **10.03.2025** | **10.03.2025**
- 11. **11.03.2025** | **11.03.2025** | **11.03.2025**
- 12. **12.03.2025** | **12.03.2025** | **12.03.2025**
- 13. **13.03.2025** | **13.03.2025** | **13.03.2025**
- 14. **14.03.2025** | **14.03.2025** | **14.03.2025**
- 15. **15.03.2025** | **15.03.2025** | **15.03.2025**
- 16. **16.03.2025** | **16.03.2025** | **16.03.2025**
- 17. **17.03.2025** | **17.03.2025** | **17.03.2025**
- 18. **18.03.2025** | **18.03.2025** | **18.03.2025**
- 19. **19.03.2025** | **19.03.2025** | **19.03.2025**
- 20. **20.03.2025** | **20.03.2025** | **20.03.2025**
- 21. **21.03.2025** | **21.03.2025** | **21.03.2025**
- 22. **22.03.2025** | **22.03.2025** | **22.03.2025**
- 23. **23.03.2025** | **23.03.2025** | **23.03.2025**
- 24. **24.03.2025** | **24.03.2025** | **24.03.2025**
- 25. **25.03.2025** | **25.03.2025** | **25.03.2025**
- 26. **26.03.2025** | **26.03.2025** | **26.03.2025**
- 27. **27.03.2025** | **27.03.2025** | **27.03.2025**
- 28. **28.03.2025** | **28.03.2025** | **28.03.2025**
- 29. **29.03.2025** | **29.03.2025** | **29.03.2025**
- 30. **30.03.2025** | **30.03.2025** | **30.03.2025**
- 31. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 32. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 33. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 34. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 35. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 36. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 37. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 38. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 39. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 40. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 41. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 42. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 43. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 44. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 45. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 46. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 47. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 48. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 49. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 50. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 51. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 52. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 53. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 54. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 55. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 56. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 57. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 58. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 59. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 60. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 61. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 62. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 63. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 64. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 65. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 66. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 67. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 68. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 69. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 70. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 71. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 72. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 73. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 74. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 75. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 76. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 77. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 78. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 79. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 80. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 81. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 82. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 83. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 84. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 85. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 86. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 87. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 88. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 89. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 90. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 91. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 92. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 93. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 94. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 95. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 96. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 97. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 98. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 99. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 100. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**


Revisi Undang-Undang TNI pun menjadi legitimasi mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang TNI sebelumnya. Setidaknya, menurut catatan Badan Pembina Hukum Tentara Nasional, ada **2.500 prajurit aktif** yang menempati jabatan sipil, baik yang diatur Undang-Undang TNI maupun di lainnya. Dengan undang-undang baru, mereka kini tak mendapatkan gaji sipil.

Prabowo lalu meminta anak buahnya di Partai Gerindra yang menjabat Wakil Ketua DPR, **Defni Dasca Ahmad**, meredakan polemik itu. Dasca bertemu dengan beberapa aktivis dan bertanya tentang pokok penolakan, lalu memasukkannya ke draf RUU TNI. Dari sini, Dasca menyatakan RUU TNI tak memisahkan **dwifungsi TNI**.

Motif

Tema pokok RUU TNI adalah meluaskan peran tentara. Prabowo ingin ada perbaikan strategi pertahanan dengan pemindahan lembaga negara yang bisa dimasuki tentara aktif termasuk Sekretaris Kabinet. TNI di bawah presiden, serta purnanjanan usia pensiun tentara. Semua itu akan memicu pola penempatan Sekretaris Kabinet karena terkesan mengizinkan Mayor **Teddy Indra Wijaya**, ajunan Prabowo yang ditunjuk menempati posisi itu.

Perluasan peran TNI di lembaga negara juga mendapat penolakan kelompok RI, terutama di sektor penanganan narkoba, sementara organisasi masyarakat sipil menyeru perus tentara di ruang sipil. Dalam draf yang disahkan, dengan versi lebih ringkas diundang rancangan awal yang disusun tim Sjafrie Sjamaodin, dua urusan ini tetap masuk menjadi ranah tentara yang baru.



Baca Sifatnya

- 01. **01.03.2025** | **01.03.2025** | **01.03.2025**
- 02. **02.03.2025** | **02.03.2025** | **02.03.2025**
- 03. **03.03.2025** | **03.03.2025** | **03.03.2025**
- 04. **04.03.2025** | **04.03.2025** | **04.03.2025**
- 05. **05.03.2025** | **05.03.2025** | **05.03.2025**
- 06. **06.03.2025** | **06.03.2025** | **06.03.2025**
- 07. **07.03.2025** | **07.03.2025** | **07.03.2025**
- 08. **08.03.2025** | **08.03.2025** | **08.03.2025**
- 09. **09.03.2025** | **09.03.2025** | **09.03.2025**
- 10. **10.03.2025** | **10.03.2025** | **10.03.2025**
- 11. **11.03.2025** | **11.03.2025** | **11.03.2025**
- 12. **12.03.2025** | **12.03.2025** | **12.03.2025**
- 13. **13.03.2025** | **13.03.2025** | **13.03.2025**
- 14. **14.03.2025** | **14.03.2025** | **14.03.2025**
- 15. **15.03.2025** | **15.03.2025** | **15.03.2025**
- 16. **16.03.2025** | **16.03.2025** | **16.03.2025**
- 17. **17.03.2025** | **17.03.2025** | **17.03.2025**
- 18. **18.03.2025** | **18.03.2025** | **18.03.2025**
- 19. **19.03.2025** | **19.03.2025** | **19.03.2025**
- 20. **20.03.2025** | **20.03.2025** | **20.03.2025**
- 21. **21.03.2025** | **21.03.2025** | **21.03.2025**
- 22. **22.03.2025** | **22.03.2025** | **22.03.2025**
- 23. **23.03.2025** | **23.03.2025** | **23.03.2025**
- 24. **24.03.2025** | **24.03.2025** | **24.03.2025**
- 25. **25.03.2025** | **25.03.2025** | **25.03.2025**
- 26. **26.03.2025** | **26.03.2025** | **26.03.2025**
- 27. **27.03.2025** | **27.03.2025** | **27.03.2025**
- 28. **28.03.2025** | **28.03.2025** | **28.03.2025**
- 29. **29.03.2025** | **29.03.2025** | **29.03.2025**
- 30. **30.03.2025** | **30.03.2025** | **30.03.2025**
- 31. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 32. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 33. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 34. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 35. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 36. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 37. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 38. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 39. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 40. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 41. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 42. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 43. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 44. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 45. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 46. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 47. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 48. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 49. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 50. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 51. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 52. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 53. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 54. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 55. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 56. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 57. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 58. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 59. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 60. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 61. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 62. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 63. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 64. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 65. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 66. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 67. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 68. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 69. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 70. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 71. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 72. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 73. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 74. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 75. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 76. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 77. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 78. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 79. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 80. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 81. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 82. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 83. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 84. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 85. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 86. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 87. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 88. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 89. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 90. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 91. **31.03.2025** | **31.03.2025** | **31.03.2025**
- 92. **31.03.2025** | **31.03.2025** |

Sinar Jaya Steelindo
Kembangkan bisnis di industri otomotif, hingga masuk ke industri teknologi informasi

UU TNI Sah, Apa yang Akan Terjadi Saat Militer Masuk Kementerian/Lembaga Negara?

Kompas.com, 23 Maret 2023, 10:45 WIB

Sinar Jaya Steelindo

30-DAY TNI PLAN FOR BEGINNERS

UU TNI disahkan pada sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/3/2023), yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pengesahan UU TNI tersebut mengantar perwira aktif bisa menduduki 14 Kementerian/Lembaga yang ditetapkan dalam undang-undang TNI, serta menambatkan tugas pokok TNI.

UU TNI disahkan saat sudah selesai proses dari masyarakat. Pada Minggu (18/3) akan dilaksanakan dialog publik bersama program aktif bisa mendengar pendapat.

Lantas, apa yang akan terjadi jika TNI aktif bisa masuk Kementerian dan Lembaga negara?

Baca juga: Apa itu UU TNI Terkini? Ini Daftar Lembaga Resmi yang Bisa Diduduki

UU TNI dan Ombudsman, Apa Saja Perubahan dan Dampaknya?

UU TNI untuk karier perwira

Pekar Hukum Administrasi Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Richo Andi Wibowo menilai, pemerintah berdalih memperbantukan UU TNI untuk meningkatkan profesionalisme perwira.

"Realitanya lebih mengindikasikan mengustakan justifikasi posisi Letkol Teddy di pemerintahan dan memberikan solusi atas miskonsepsi perencanaan karier di TNI," tuturnya saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (20/3/2023).

Baca juga: Gejala Iran Bisa Jungkir Balikkan Tatanan Dunia

Richo menjelaskan, pengesahan UU TNI membolehkan perwira aktif mengaji jabatan di kementerian/lembaga negara.

Sebelum UU TNI versi baru disahkan, beberapa perwira aktif diketahui telah mengaji posisi jabatan sipil meski belum mengundurkan diri dari dinas kaprajurit.

Pengesahan UU TNI akan membuat perwira aktif bisa mengaji jabatan sipil meski masih menjabat sebagai tentara.

Baca juga: Kala Prajurit TNI Ragu Ditanya Merhan Sjafric: Pilih Pendidikan atau Tugas Operasi?

Selain itu, Richo meyakini UU TNI disahkan karena ada masalah atau salah perhitungan pada perencanaan karier TNI.

"Maksud dari miskonsepsi di sini adalah perwira yang ada jauh lebih banyak dibandingkan posisi jabatan yang tersedia," imbuhnya.

Dia menuturkan, UU TNI mengantar perpanjangan masa pensiun perwira sehingga bisa menjabat lebih lama dan menduduki posisi birokrasi pemerintah tanpa melepas status kaprajurit.

Richo mengungkapkan, upaya pembenturan UU TNI untuk membantu karier para perwira bahkan terlihat sejak sebelum revisi UU TNI resmi dipertahankan.

Upaya itu berupa bantuan bagi para kolonel agar dapat menduduki posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pemberian pelatihan manajemen dan bisnis untuk mereka.

Baca juga: 14 Kementerian dan Lembaga yang Bisa Dijabat Prajurit Aktif Usai UU TNI Disahkan

Dampak TNI masuk kementerian

Richo mengungkapkan, pengesahan revisi UU TNI berpotensi menimbulkan masalah bagi para pencari kerja, aparatur sipil negara (ASN), dan pegawai BUMN.

Padanya, UU TNI membolehkan para perwira aktif mengaji jabatan sipil aktif di 14 Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga tersebut yakni bidang koordinasi bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dasar pertahanan nasional, keselamatan negara yang menyangkut urusan administrasi presiden dan wakil/wakilnya militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau siber negara.

Baca juga: Koneksi Haseginya Syarif Afi di Gunung Salaka Hingar Dituntaskan Menangkap di Lingsar Pontak, Sabuk Sabukan

Kemudian, lembaga keahlihan nasional, penelitian dan pengujian, sarkotika nasional, pengelola pariwisata, pengelolaan lembaga penanggulangan bencana, keamanan laut, ketahanan pangan, Indonesia, dan Maklumlah Agung.

"Pembenturan UU TNI, dimungkinkan akan menimbulkan konflik ASN dan pegawai BUMN dengan membuka ruang untuk perwira TNI," ujar Richo.

Dampak perubahan aturan tersebut, jumlah jabatan sipil di tingkat atas dan menengah untuk sejumlah Kementerian/Lembaga negara menjadi berkurang.

Baca juga: AS Karahkan Jen F-35 dan Bombar ke Gasek, Serangan ke Iran Melahit Nyawa?

Sementara pegawai yang berada di posisi bawah atau di level lebih rendah karena posisi jabatan di atas telah terisi perwira TNI.

"Akibatnya rencana pengadaan pegawai ASN dan/atau rekrutasi karyawan dapat berkurang," tandas Richo.

Dalam segala situasi, KOMPASS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalis. <https://www.kompas.com>

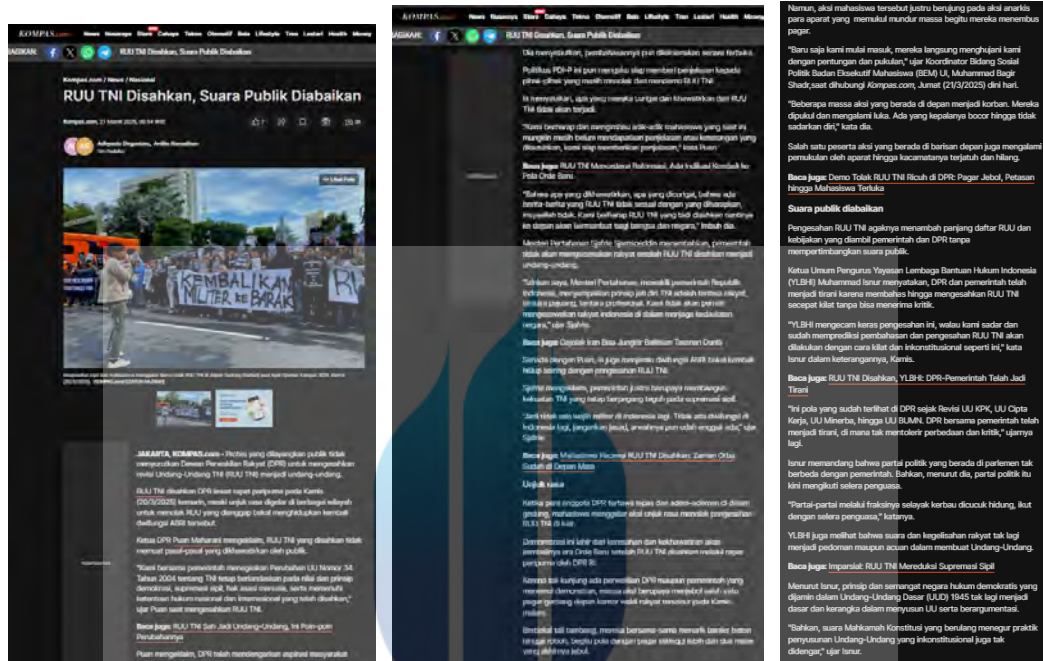


Berita 6

Judul : RUU TNI Disahkan, Suara Publik Diabaikan

Jurnalis: Adhyasta Dirgantara dan Ardito Ramadhan

Media : Kompas.com

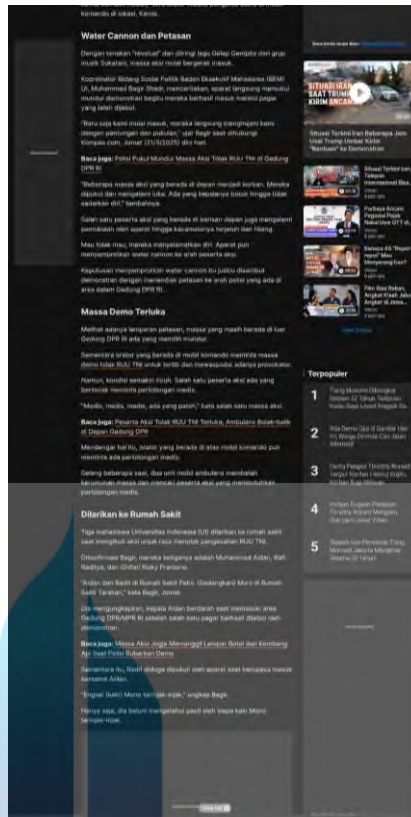


Berita 7

Judul : Demo Tolak RUU TNI Ricuh di DPR: Pagar Jebol, Petasan hingga Mahasiswa Terluka

Jurnalis: Baharudin Al Farisi dan Faieq Hidayat

Media : Kompas.com



Berita 8

Judul : DPR dan Pengesahan RUU TNI: Legislasi Kilat, Demokrasi Sekarat?

Jurnalis: Firdaus Arifin

Media : Kompas.com



KOMPAS.com | Berita | Olahraga | Showbiz | Gaya Hidup | Travel | Health | Money | Properti | Sekolah | Travel | |

BAGIKAN

DPR dan Pengesahan RUU TNI: Legislasi Kilat, Demokrasi Sekarat?

Kompas.com, 22 Maret 2020, 08:53 WIB

Artikel ini adalah konten, artikel ini dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap redaksi.

Liola Fata

OLAHRAGA & OUTDOOR
Beli Baju Olahraga & Outdoor, hemat hingga Rp100.000!

Alvia House | Alvia Swimwear ASIO - Baju...
Rp168.000
BELI SEKARANG!

Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan secepatnya setiap saat.

Anda bisa menjadi kolaborasi!

Anda bisa menjadi kolaborasi! Berikan ide-ide yang inovatif, sehingga produk kami dapat lebih cepat, akurat, dan bermanfaat. Kami akan memberikan kompensasi yang pantas dan adil. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.kompas.com/colab](#) atau hubungi kami di [021-25331111](tel:021-25331111) dan [021-25331112](tel:021-25331112).

Editor: Susanto Satrio

PENGESAHAN revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlangsung cepat, nyata tanpa perdebatan publik yang berarti.

Dalam hitungan minggu, perubahan yang membuka jalan bagi perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun lebih dulu resmi menjadi aturan.

Legislasi kilat ini bukan sekadar soal efisiensi kerja parlemen, tetapi lebih dari itu adalah cerminan bagaimana demokrasi di negeri ini sedang diuji.

Pertanyannya: apakah kita benar-benar siap untuk menerima perubahan ini? Atau ada kepentingan lain yang lebih besar?

OMRON
Predictive Maintenance Solutions

KOMPAS.com | Berita | Olahraga | Showbiz | Gaya Hidup | Travel | Health | Money | Properti | Sekolah | Travel | |

BAGIKAN

DPR dan Pengesahan RUU TNI: Legislasi Kilat, Demokrasi Sekarat?

Reformasi 1998 membawa satu pesan kuat: supremasi sipil harus dijaga. Demokrasi yang tumbuh dari gelombang protes terhadap rezim Orde Baru menegaskan bahwa militer tidak boleh lagi memiliki peran ganda dalam politik dan pemerintahan.

Ruhlah sebetulnya, dalam desain demokrasi kita, pemisahan antara militer dan sipil menjadi prinsip utama.

Masalah Penyelenggara Pemilu

Namun, revisi UU TNI yang baru justru membuka kembali ruang bagi militer untuk memasuki ranah sipil.

Peristiwa saat ini dapat menjadi titik balik strategi di lembaga-lembaga sipil, termasuk Kementerian dan Instansi Militer.

Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi yang selama dua dekade terakhir berusaha mematai ulang hubungan sipil-militer secara lebih proporsional.

Militer, sebagaimana fungsi dasarnya, bertugas menjaga pertahanan negara. Sementara pemerintahan sipil bertugas menjalankan administrasi negara, membuat kebijakan publik, dan membangun sistem demokrasi.

Jika batas ini kabur, maka kita bisa melihat kembalinya "dwifungsi" militer dalam wujud yang lebih halus, tetapi dengan dampak yang tak kalah serius.

DPR, mesin stempel atau wakil rakyat?

Proses legislasi yang berlangsung mengulang pertanyaan lair: di mana posisi DPR dalam merajai demokrasi?

Seharusnya, parlemen menjadi arena perdebatan publik, tempat rakyat diwakili dan kepentingan nasional didiskusikan secara matang.

Namun, dalam kasus RUU TNI, DPR tampaknya lebih berperan sebagai "mesin stempel" daripada sebagai lembaga legislasi yang kritis dan independen.

Tak ada diskusi panjang yang melibatkan akademisi, masyarakat sipil, maupun organisasi pro-demokrasi. Tak ada uji publik yang benar-benar memberi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat.

Protes di jalan memperingati 22 tahun reformasi

Dalam sistem demokrasi, aturan yang mengontrol peran militer dalam pemerintahan seharusnya tidak bisa diabaikan dengan terburu-buru.

KOMPAS.com | Berita | Olahraga | Showbiz | Gaya Hidup | Travel | Health | Money | Properti | Sekolah | Travel | |

BAGIKAN

DPR dan Pengesahan RUU TNI: Legislasi Kilat, Demokrasi Sekarat?

baru.

Negara-negara demokrasi lain selalu memastikan bahwa perubahan besar seperti ini melewati kajian akademis mendalam, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan diuji dalam ruang publik secara terbuka.

Cepatnya pengesahan RUU ini menunjukkan pola legislasi yang kian mengkomodifikasi politik akomodasi kepentingan lebih dominan dibanding perdebatan rasionalisasi yang menekankan masyarakat luas.

Apakah pengesahan revisi UU TNI ini menandai ancaman bagi demokrasi Indonesia? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita melihat dampaknya ke depan.

Jika pengangkatan perwira aktif ke posisi sipil hanya bersifat sementara dan dilakukan dalam konteks tertentu, mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Namun, jika ini menjadi pola baru, kita sedang menuju era di mana supremasi sipil bisa semakin lemah.

Sangat penting untuk melihat militer tidak hanya terlibat dalam urusan sipil, melainkan check and balance kebidanan.

Ta harapkan negara yang mengontrol transisi demokrasi, kebidanan militer dalam pemerintahan sering bersung pada kelemahan institusi sipil, berkurangnya transparansi, dan meningkatnya kontrol politik yang berpotensi negatif.

RUU ini bukan hanya soal mengakomodasi kepentingan militer, tetapi juga soal bagaimana demokrasi kita dipertahankan.

Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu bahwa pemisahan militer telah dalam masa & fu rnah sipil berisiko meyakinkan pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratis.

Orde Baru adalah contoh nyata bagaimana dwifungsi ASRI kala itu membuat roda pemerintahan lebih berputar pada stabilitas politik dibandingkan kebebasan sipil.

Kebijakan dan keputusan negara lebih banyak dikendalikan oleh kepentingan militer daripada oleh mekanisme demokrasi yang sehat.

Setelah 1998, upaya informasi dipikirkan untuk membuat peran militer dalam politik. Undang-undang sebelumnya telah mengatur bahwa perwira aktif tidak bisa menduduki jabatan sipil, kecuali di Kementerian yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan.

Revisi UU TNI kini melonggarkan butiran tersebut, membuka ruang bagi militer untuk kembali berperan di sektor-sektor yang selama ini dipegang oleh sipil.

Pertanyannya: apakah kita benar-benar ingin kembali ke era itu?

Menyelamatkan Demokrasi

Demokrasi bukan hanya soal prosedur Pemilu, atau kebebasan berbicara. Demokrasi juga menyangkut bagaimana individu-individu negara dikelola dengan transparansi dan bertanggung jawab.

Kalau militer kembali diberi ruang luas dalam pemerintahan sipil, kita sedang membangun risiko yang bisa mengancam demokrasi itu sendiri.

DPR masih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap UU ini. Justifikasi revisi ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Peran sipil yang merasa bahwa revisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

KOMPAS.com | Berita | Olahraga | Showbiz | Gaya Hidup | Travel | Health | Money | Properti | Sekolah | Travel | |

BAGIKAN

DPR dan Pengesahan RUU TNI: Legislasi Kilat, Demokrasi Sekarat?

Prinsip demokrasi dan konstitusi.

Masyarakat sipil juga perlu lebih aktif mengawal kebijakan ini agar tidak menjadi jalan mundur bagi reformasi.

Legislasi yang terburu-buru sering kali melahirkan kebijakan yang tidak matang. Jika revisi UU TNI ini tidak dikritisi dengan serius, kita berisiko kehilangan prinsip-prinsip demokrasi yang telah kita bangun selama lebih dari dua dekade.

28/14/7 DAY HOME WORKOUT CHALLENGE

7-DAY PLAN 14-DAY PLAN 28-DAY PLAN

DPR boleh berbangga dengan kecepatan kerja mereka dalam mengesahkan undang-undang ini. Namun, apakah demokrasi kita akan bangga dengan hasil akhirnya?

Hanya waktu yang akan menjawab.

Lampiran 2 CV

	AISYAH PUTRI RAMADHANI 8257811030556 aisyahputri.rn@gmail.com www.linkedin.com/in/aisyahputriramadhani Jl. Lapangan Tenis NO 97 Brawijaya, Jakarta Barat
Saat ini saya adalah mahasiswa aktif semester akhir jurusan Komunikasi Digital Universitas Mercu Buana. Saya memiliki pengalaman organisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Mercu Buana English Club dan Himpunan Mahasiswa Digital Communication. Saya adalah pribadi yang cepat tanggap dan suka mempelajari hal baru. Saya memiliki minat yang besar dalam bidang sosial media dan terus mengikuti dan mengeksplorasi perkembangan serta tren terbaru di Sosial Media. Ketertarikan saya terhadap media sosial telah mendorong saya untuk mendalami dan mempelajari strategi pengelolaan konten, analisis data, dan keterlibatan pengguna.	
Pengalaman Kerja	
Elatus - Jakarta, Indonesia	May 2024 - Jul 2024
Social Media Specialist	
Elatus adalah brand sosial yang memproduksi dan memasarkan parfum. Elatus mengupayakan brand-image elatus dan menawarkan berbagai aroma yang elegan. Elatus sering kali memiliki pendakian perkolasi dengan desain kemasan dan pemasaran, menyajikan cerita di balik setiap aroma yang mereka tawarkan.	
<ul style="list-style-type: none">• Menyusun content plan yang selaras dengan tujuan dan identitas brand• Mengelola dan memposting konten secara konsisten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan• Menulis caption yang menarik, informatif, dan sesuai target audiens• Memantau serta menanggapi komentar dan pesan audiens secara responsif• Melakukan interaksi aktif dengan followers untuk meningkatkan engagement• Menyusun weekly engagement report sebagai bahan evaluasi performa konten	
PT Thiva Grovia Bersama - Jakarta, Indonesia	Oct 2025 - Jan 2026
Digital Marketing Intern	
PT Thiva Grovia Bersama, yang lebih dikenal dengan nama brand Severi, merupakan salah satu brand fashion lokal Indonesia yang bergerak di bidang retail dan penjualan fashion wanita. Severi berfokus pada penyelesaian produk fashion yang mengedepankan desain, modan, memaine, dan feminin.	
<ul style="list-style-type: none">• Menyusun content plan secara terstruktur• Melakukan pengambilan video konten untuk kebutuhan media sosial• Mengedit dan mengoptimalkan video konten agar sesuai dengan identitas brand• Mengelola dan memposting konten secara konsisten berdasarkan jadwal yang telah ditentukan• Menyusun weekly engagement report untuk menganalisis performa konten	
Pendidikan	
Universitas Mercu Buana - Jakarta, Indonesia	Aug 2022
Sarjana Ilmu Komunikasi, 3.91/4.00	
<ul style="list-style-type: none">• Anggota Divisi Kompetisi Storytelling pada English Event 2023 yang diselenggarakan Mercu Buana English Club, bertugas sebagai Liaison Officer yang berhubungan dengan para peserta lomba.• Anggota Divisi Acara Mercu Buana English Club Open Recruitment dan Open House 2023, bertanggung jawab untuk menyusun alur interview dan konsep acara.• Panitia Kompetisi Debat Bahasa Indonesia PIOM 2023, bertanggung jawab untuk membuat mosi debat, peraturan debat, dan menjalankan kompetisi.• Anggota Divisi Public Relation Mercu Buana English Club Leadership Training Program 2024, bertanggung jawab untuk berbubungan dengan peserta dan dokumentasi.• Koordinator Divisi Acara Sosial Project 2024 yang diselenggarakan oleh Mercu Buana English Club, bertanggung jawab untuk menyusun konsep dan rangkaian acara.• Vice Project Officer English Event 2024 yang diselenggarakan oleh Mercu Buana English Club, bertanggung jawab untuk menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengorganisir acara.• Mentor LED dan LKMM yang diselenggarakan oleh Hima Digital Communication, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengorganisir team.• Anggota Divisi Konsumsi Workshop Magang Digicom 2024, bertanggung jawab atas konsumsi panitia, peserta, dan petinggi.• Koordinator Divisi Publikasi, Design, dan Dokumentasi DIGIMIND 2024, bertanggung jawab untuk membuat konsep dan tema dasar design, membuat workplan dan jadwal post, membuat design untuk publikasi.• Anggota Divisi Media Creative LED dan LKMM Hima Digital Communication 2025, bertanggung jawab untuk membuat berbagai design untuk keperluan publikasi.• Anggota Divisi Media Creative DIGIFAIR 2025, bertanggung jawab untuk membuat berbagai design untuk keperluan publikasi.• Project Mata Kuliah Kewirausahaan Usaha I. Membuat rancangan, ide dan pitchdeck bisnis Amooore Invitation.	

- Project Mata Kuliah Human Relations, Membangun sebuah komunitas digital di Instagram, yang menginisiasi sebuah Kampanye Anti Cyberbullying.
- Project Mata Kuliah Management Media Sosial, menjadi Social Media Specialist yang bertanggung jawab untuk mengelola akun Sosial Media klien.
- Project Mata Kuliah Desain Web Interaktif, menjadi tim editor perusahaan Chick State, membuat serta mendesain website Chick State.
- Project Mata Kuliah English For Communication II, membuat video PSA mengenai cyberbullying.
- Project Mata Kuliah Animasi Digital, membuat animasi 3D menggunakan aplikasi Blender.
- Project Mata Kuliah Digital Media Analysis, memantau dan menganalisis sosial media suatu brand dan membuat laporan perkembangannya.
- Project Mata Kuliah Kampanye Web dan Media Sosial, berkolaborasi dengan UMKM dan membantu Mitra UMKM untuk membuat kampanye digital.

Pengalaman Organisasi

Unit Kegiatan Mahasiswa Mercu Buana English Club - Jakarta, Indonesia Oct 2022 - Jul 2023

Anggota Divisi 1 Debat

Mercu Buana English Club adalah organisasi mahasiswa di tingkat Universitas yang bertujuan untuk menjadi wadah dan tempat mahasiswa untuk mempelajari dan mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Mercu Buana English Club juga dapat menjadi wadah mahasiswa yang tertarik mengikuti berbagai lomba bahasa Inggris nasional dan internasional.

- Mempelajari dasar-dasar sistem debat British Parliamentary.
- Mengikuti lomba debat bahasa Inggris.

Unit Kegiatan Mahasiswa Mercu Buana English Club - Jakarta, Indonesia Aug 2023 - Jul 2024

Vice Divisi 1 Debat

Mercu Buana English Club adalah organisasi mahasiswa di tingkat Universitas yang bertujuan untuk menjadi wadah dan tempat mahasiswa untuk mempelajari dan mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Mercu Buana English Club juga dapat menjadi wadah mahasiswa yang tertarik mengikuti berbagai lomba bahasa Inggris nasional dan internasional.

- Membuat syllabus pembelajaran tentang debat dan British Parliamentary.
- Mengatur dan membuat jadwal kelas rutin debat.
- Memberikan materi dan mentoring debat British Parliamentary System.
- Mengawasi dan membimbing anggota Divisi 1 Debat Membuat laporan akhir periode divisi.

Unit Kegiatan Mahasiswa Mercu Buana English Club - Jakarta, Indonesia Aug 2024 - Present

Anggota Divisi 2 Public Relation

- Bertanggung jawab untuk mengelola akun Instagram MBEC.
- Bertanggung jawab untuk meng-dokumentasikan setiap kegiatan MBEC.
- Bertanggung jawab untuk membuat ide-ide konten dan juga materi konten

Himpunan Mahasiswa Digital Communication - Jakarta, Indonesia Nov 2024 - Present

Graphic Design

Himpunan Mahasiswa Digital Communication adalah organisasi mahasiswa tingkat jurusan yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi mahasiswa jurusan Digital Communication untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat melalui program-program kerja yang dilaksanakan.

- Membuat desain visual untuk publikasi media sosial.
- Berkolaborasi dengan content writer dan content creator untuk menciptakan hasil konten terbaik yang selaras.
- Mengelola desain dari awal hingga selesai, termasuk revisi dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik anggota lain.

Kemampuan, Penghargaan, dan Kompetisi

- **Penghargaan** (2024): Juara 2 Kompetisi Photography Typography Mercu Buana English Club Mini Competition
- **Penghargaan** (2024): Juara 3 Kompetisi Poster COMMUNIVERSE 2024
- **Kompetisi** (2022): National English Debat Competition - UNASFEST 2022
- **Kompetisi** (2023): National English Debate Competition - UNASFEST 2023
- **Kompetisi** (2023): National University Debate Competition Internal Selection - Mercu Buana University
- **Hard Skills**: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Workspace (GDocs, Spreadsheets, Google Slides), Canva.
- **Soft Skills**: Effective Communication, High Creativity, Team Collaboration, Adaptive & Flexible
- **Kemampuan Bahasa**: Bahasa Indonesia (Penutur Asli) dan Bahasa Inggris (B2)